



RINGKASAN EKSEKUTIF



# Laporan **Land Gap**

**2025**

Memperbarui tata kelola ekonomi global untuk mencapai tujuan iklim dan keanekaragaman hayati

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>3</b>
<b>Ringkasan eksekutif</b> .....	<b>4</b>
<b>Rekomendasi</b> .....	<b>8</b>

**Ini adalah intisari dari Laporan Land Gap 2025 yang lengkap, yang mencakup beberapa bab berikut:**

**Bab 1: Kesenjangan Lahan**

*Kate Dooley (Universitas Melbourne), Alister Self dan Yun-fang Tsai (Climate Resource), Kate Horner (Peneliti Independen)*

**Bab 2: Kesenjangan Hutan**

*Heather Keith (Universitas Griffith), Kate Dooley (Universitas Melbourne), Alister Self dan Yun-fang Tsai (Climate Resource)*

**Bab 3: Dari ekstraksi hingga restorasi: Transformasi tata kelola ekonomi global untuk hasil hutan dan keanekaragaman hayati**

*Kate Horner (Peneliti Independen), Kate Dooley (Universitas Melbourne), Jessica Dempsey (Universitas British Columbia, Institut Iklim dan Masyarakat)*

**Bab 4: Baik atau buruk? Memilih hubungan antara utang, komunitas, dan alam**

*Rebecca Ray dan Gefei Kofi Zhou (Pusat Kebijakan Pembangunan Global, Universitas Boston)*

**Bab 5: Reformasi pajak dan penangkapan aliran keuangan ilegal untuk hutan**

*Luke Holland (Tax Justice Network) dan Markus Trilling (Eurodad)*

**Bab 6: Studi Kasus: Subsidi publik di Eropa: berkah atau bencana bagi keanekaragaman hayati hutan dan ketahanan iklim?**

*Metodi Sotirov (Universitas Freiburg)*

**Bab 7: Reformasi kebijakan perdagangan untuk perlindungan hutan dan kedaulatan pangan**

*Sophia Murphy (Institut Kebijakan Pertanian dan Perdagangan)*

**Laporan lengkap dalam bahasa Inggris dapat diunduh di sini:** <https://landgap.org/2025/report>

## Saran untuk kutipan

Land Gap (2025) The Land Gap Report 2025, Universitas Melbourne.

Tersedia di: <https://www.landgap.org/>

## Ucapan Terima Kasih

Diedit oleh Clare Pedrick, desain tata letak oleh Andy Omel, grafis oleh Ethan Cornell

Foto sampul matahari terbit di Lombok, Indonesia oleh Ikan Nakal/Adobe Stock. Semua gambar didapatkan dari Adobe Stock kecuali jika dinyatakan sumber lainnya

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari *Climate and Land Use Alliance*, *European Climate Foundation*, dan *Rockefeller Brothers Fund*.

Tanggung jawab atas informasi dan pandangan yang tercantum dalam Laporan Land Gap ini sepenuhnya berada pada para penulis. Kontributor dan pendukung tidak bisa dituntut atas penggunaan apa pun yang mungkin dilakukan terhadap informasi yang terkandung di dalamnya

Diterbitkan pada bulan November 2025.

## Kata Pengantar

Lahan dalam perekonomian seringkali hanya dilihat dari segi kegunaannya secara produktif; namun, lahan mencakup dasar pembentukan wilayah, yaitu hubungan budaya antara manusia dan kehidupan itu sendiri untuk mempertahankan reproduksi masyarakat dan alam. Laporan Land Gap 2025 mengambil perspektif integral ini, tidak hanya untuk mengevaluasi realitas dan potensi lahan untuk tujuan mitigasi karbon, tetapi juga untuk mengadvokasi model ekonomi yang restoratif dan berbasis hak.

Kompleksitas penggunaan lahan mencerminkan hubungan politik dan pertarungan kekuasaan yang ada dalam setiap konteks nasional dan hubungan internasional. Dengan 40 persen lahan dunia terancam desertifikasi dan sangat terdegradasi, jutaan orang terpaksa mengungsi akibat konsekuensi sistemik kapitalisme berbasis bahan bakar fosil, serta emisi dari pertanian, kehutanan, dan perubahan penggunaan lahan yang menyumbang 13 hingga 21 persen dari total emisi global. Kehilangan lahan dapat dilihat tidak hanya sebagai ancaman tetapi juga sebagai peluang untuk merumuskan ulang hubungan manusia dengan sistem hidup planet ini.

Laporan ini merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam perspektif tersebut, karena mampu menganalisis hambatan struktural politik dan ekonomi yang menghambat transformasi ini. Laporan ini membahas isu-isu utama dalam tata kelola ekonomi global, utang negara, reformasi kebijakan pajak dan perdagangan, dampak subsidi, serta peran rantai nilai komoditas terhadap kedaulatan pangan.

Ini merupakan sebuah langkah maju yang disambut baik, karena laporan ini mengakui kebutuhan akan transformasi ekonomi struktural dan perlunya kerja sama internasional, melampaui paradigma yang lebih sempit dari Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Naturally Determined Contribution/NDCs) saat ini. Laporan ini ditulis berdasarkan Laporan Land Gap Pertama (2022), yang melakukan penilaian global pertama tentang luas lahan total yang diperlukan untuk memenuhi target mitigasi dalam NDCs dan Strategi Jangka Panjang negara-negara. Laporan 2022 mengungkapkan bahwa, alih-alih membatasi penggunaan dan produksi bahan bakar fosil, target mitigasi menggunakan penghilangan karbon berbasis lahan sebagai solusi cepat untuk kompensasi karbon. Luas lahan total yang diperlukan untuk memenuhi

janji-janji tersebut memperkuat paradigma linear dan sederhana dalam menangani perubahan iklim, dengan risiko memperburuk ancaman yang sedang berlangsung terhadap lahan masyarakat adat dan komunitas lokal, serta mengikuti pendekatan pasar yang sama yang menciptakan krisis.

Banyak solusi untuk krisis iklim sudah ada dalam respons budaya yang digunakan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengelola lahan dan wilayah mereka. Laporan Panel Antarpeperintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) telah mengakui bahwa salah satu langkah paling efektif untuk mencapai target iklim 2030, selain energi terbarukan, adalah menghentikan deforestasi dan memulihkan lahan.

Apakah hal ini akan dilakukan melalui lensa kapitalisme eksploitatif, 'alat pasar inovatif', atau sebaliknya, melalui struktur tata kelola inklusif yang memperkuat budaya, hak komunitas, dan alam, bergantung pada keseimbangan kekuatan politik yang ada. Laporan ini berkontribusi pada refleksi tersebut dengan mengungkap 'kesenjangan keuangan' dalam negosiasi iklim internasional sebagai jebakan potensial untuk mempromosikan investasi swasta dalam alam dan hutan, daripada mengatasi struktur ekonomi dan politik yang mewujudkan ketidakseimbangan kekuasaan politik, yang secara luas dikecam oleh gerakan keadilan sosial dan lingkungan.



**Susana Muhamad**  
*Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Pembangunan Berkelanjutan, Kolombia*

# Ringkasan eksekutif

## PEMBAHASAN UTAMA

### Kesenjangan lahan

Janji iklim terbaru pemerintah sangat bergantung pada pengurangan karbon berbasis lahan, yang membutuhkan **1 miliar hektar** lahan - luas yang lebih besar dari Cina - serta di saat yang sama menunda tindakan serius terhadap perubahan iklim hingga akhir abad ini. Ketergantungan berlebihan pada pengurangan karbon hutan di masa depan dari sejumlah negara penghasil emisi tinggi, alih-alih menghentikan emisi dari bahan bakar fosil dan perusakan ekosistem, malah mengancam stabilitas iklim.

### Kesenjangan hutan

Skala 'kesenjangan hutan'—perbedaan antara target global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan, dengan rencana aktual yang diajukan negara-negara dalam janji iklim mereka - mewakili **20 juta hektar per tahun dari kehilangan dan kerusakan hutan yang terus berlanjut**. Hal ini didasarkan pada deforestasi **4 juta hektar** per tahun hingga 2030 - penurunan kurang dari 50 persen dari tingkat saat ini; dan degradasi **16 juta hektar** - penurunan kurang dari 10 persen dari tingkat saat ini. Perlu adanya tindakan yang lebih tegas, karena kalau tidak maka 'kesenjangan hutan' yang terus melebar akan mengancam stabilitas iklim dan ekosistem.

### Reformasi tata kelola ekonomi global

Struktur ekonomi saat ini - institusi, aturan, dan mekanisme keuangan yang membentuk masyarakat kita - membatasi kemampuan negara-negara untuk mengejar jalur pembangunan tanpa deforestasi. Dihadapkan pada tekanan jangka pendek untuk membayar utang, menarik investasi internasional, dan mematuhi lembaga keuangan internasional, pemerintah sering kali bergantung pada mempertahankan atau bahkan memperluas sektor ekstraktif yang menghasilkan emisi dan mendorong perusakan hutan, terkadang bahkan bertentangan dengan mandat warga negaranya sendiri. Transformasi sistem-sistem ini sangat penting untuk mencapai tujuan iklim dan keanekaragaman hayati global.

### Utang Negara

Pendekatan kontemporer dalam menyelesaikan utang negara memperdalam ketergantungan negara-negara pada komoditas dan melemahkan kemampuan mereka untuk melindungi masyarakat terpinggirkan dan ekosistem rentan dari tekanan perluasan sektor pertanian dan ekstraktif. Pendekatan alternatif terhadap krisis utang negara dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk mengatur sektor komoditas dan melindungi masyarakat adat dan komunitas lokal serta ekosistem yang mendukungnya. Hal ini berarti bahwa semua kreditor - termasuk pemegang obligasi, bank pembangunan multilateral, dan pemberi utang negara - perlu menawarkan pengurangan utang yang berarti bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

### Pajak

Reformasi aturan transparansi keuangan internasional dan kerjasama perpajakan berpotensi mengembalikan ratusan miliar dolar pendapatan yang hilang, sekaligus memerangi kerahasiaan dan keuntungan dari aktivitas yang merusak lingkungan. Demokratisasi pembuatan kebijakan perpajakan di tingkat nasional dan internasional sangatlah penting untuk memberikan pendapatan bagi hak atas hutan dan lahan, serta memulihkan kembali perekonomian global.

### Perdagangan

Aturan perdagangan dan investasi saat ini memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi pedagang komoditas dalam rantai nilai global. Mengabaikan pengaruh korporasi telah menyebabkan kegagalan kebijakan, janji yang tidak ditepati, dan kehilangan hutan yang tak kunjung berhenti. Pembangunan ekonomi harus didasarkan pada kedaulatan pangan, hak atas pangan, dan perlindungan ekosistem yang tangguh. Aturan perdagangan pertanian harus memperkuat fondasi ini, bukannya bertentangan dengan hal tersebut.

Lahan dan hutan memegang peranan sentral dalam mencapai tujuan perjanjian iklim dan keanekaragaman hayati yang disepakati dalam Konvensi Rio. Ekosistem alam melindungi masyarakat dari bencana terkait iklim yang semakin sering terjadi dan mengatur sistem iklim dan air. Ekosistem hutan khususnya, menyimpan jumlah karbon yang besar dan memiliki potensi untuk menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer, kontribusi yang semakin vital seiring planet ini mendekati titik kritisnya. Ekosistem juga menjadi tempat tinggal bagi 200 juta masyarakat adat dan komunitas lokal, dimana 1,7 miliar orang lainnya bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka. Selain nilai lingkungan dan sosialnya, lahan, hutan, dan keanekaragaman hayati menjadi landasan ekonomi global, menyediakan dasar bagi kesejahteraan manusia dan kemakmuran bersama.

Banyak negara telah memasukkan pengurangan karbon berbasis lahan dalam janji mitigasi iklim mereka menjelang COP30 di Belém, Brasil, pada bulan November 2025. Janji-janji baru ini memberikan gambaran tentang tingkat ambisi dalam komitmen iklim negara-negara, serta bagaimana komitmen tersebut akan mempengaruhi penggunaan lahan di masa depan, termasuk terkait dengan keanekaragaman hayati, keamanan pangan, dan hak atas lahan.

Laporan ini menemukan bahwa janji-janji tersebut masih bergantung pada penyerapan karbon di darat untuk mengimbangi emisi yang terus berlanjut dari bahan bakar fosil serta pembukaan dan degradasi hutan, sehingga menghalangi potensi penuh lahan untuk mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati. Ketergantungan berlebihan pada mitigasi iklim berbasis lahan berisiko menggeser produksi pangan, melemahkan ketahanan ekosistem, dan menunda penghentian emisi gas rumah kaca yang diperlukan. Pada saat yang sama, janji iklim negara-negara gagal mendorong rencana konkret untuk menghentikan kehilangan dan degradasi hutan, sehingga

pencapaian tujuan global terkait iklim dan keanekaragaman hayati semakin sulit tercapai.

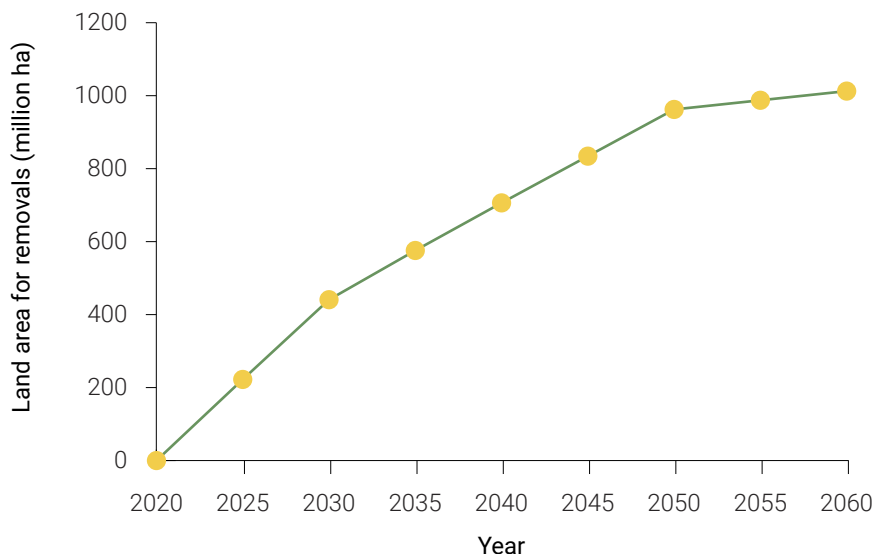
## Kesenjangan Lahan

*Laporan Land Gap 2025* memberikan penilaian terbaru mengenai luas lahan yang diperlukan untuk penghapusan karbon dalam komitmen iklim yang diajukan ke UNFCCC hingga November 2025. Lahan yang dijanjikan untuk pengurangan karbon kini melebihi 1 miliar hektar - jauh melampaui apa yang memungkinkan atau berkelanjutan. Hal ini mewakili peningkatan dari Land Gap 2022 dan pembaruan di tahun 2023 yang menemukan bahwa 990 juta hektar lahan diperlukan untuk memenuhi komitmen iklim yang diajukan hingga akhir 2023. Hampir setengah dari area tersebut, 441 juta hektar - lebih luas dari luas India - membutuhkan konversi lahan untuk aktivitas pengurangan karbon. Konversi lahan pada skala ini akan menggeser produksi pangan, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengganggu mata pencaharian, menyebabkan pertukaran sosial dan ekologi yang jauh lebih besar daripada manfaat iklim yang potensial. Sebaliknya, restorasi ekosistem (untuk yang dijanjikan sejumlah 572 juta hektar) dapat mencapai pengurangan karbon sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Laporan ini mengevaluasi kembali semua komitmen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebagaimana didefinisikan oleh target jangka pendek yang tercantum dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC), serta yang tercantum dalam Strategi Pengembangan Emisi Rendah Jangka Panjang (LT-LEDS), yang mencakup 95 komitmen baru sejak Januari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara semakin mengandalkan sektor lahan untuk pengurangan karbon guna memenuhi

### Penghapusan karbon dioksida dalam komitmen iklim nasional

Janji-janji iklim negara-negara bergantung pada 1,01 miliar hektar lahan untuk pengurangan karbon, dengan janji-janji lahan terbesar dari beberapa negara terjadi pada akhir abad ini.



Sumber: Analisis penulis sendiri

target iklim yang telah mereka janjikan. Sebagian besar negara besar dengan emisi tinggi menyumbang lebih dari 70 persen dari total lahan yang termasuk dalam komitmen, menunjukkan kurangnya ambisi dalam mengurangi emisi dari bahan bakar fosil dalam jangka pendek, dan sebaliknya mengandalkan sektor lahan pada akhir abad ini.

### Lahan dan hutan terancam oleh aktivitas ekstraktif

Lahan tetap terancam oleh praktik ekstraktif yang berkelanjutan, yaitu bentuk aktivitas ekonomi dan organisasi yang didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seringkali untuk ekspor, dengan manfaatnya sebagian besar terakumulasi jauh dari lokasi ekstraksi. Lebih dari setengah permukaan daratan bumi telah melampaui ambang batas ekologi kritis, melemahkan integritas ekosistem, mengancam hak-hak, dan mengganggu produksi pangan. Sektor lahan memerlukan transformasi mendesak. Hutan terus hilang dan terdegradasi dengan laju yang mengkhawatirkan, dengan 7,2 juta hektar deforestasi pada tahun 2024, yang melepaskan 4 gigaton CO<sub>2</sub>, semakin mengikis kemampuan ekosistem hutan untuk berkontribusi pada tujuan stabilisasi iklim. Pada tahun 2023 dan 2024, kebakaran ekstrem mengurangi penyerapan karbon hutan menjadi seperempat dari efek normalnya. Produksi pertanian yang didorong oleh komoditas dan penebangan industri merupakan penyebab utama hilangnya hutan dan degradasi, bertanggung jawab atas lebih dari setengah hilangnya hutan global, meskipun kelaparan dan ketidakamanan pangan terus mengganggu aspirasi pembangunan di seluruh dunia.

### Pendekatan yang gagal dan peluang yang terlewatkan

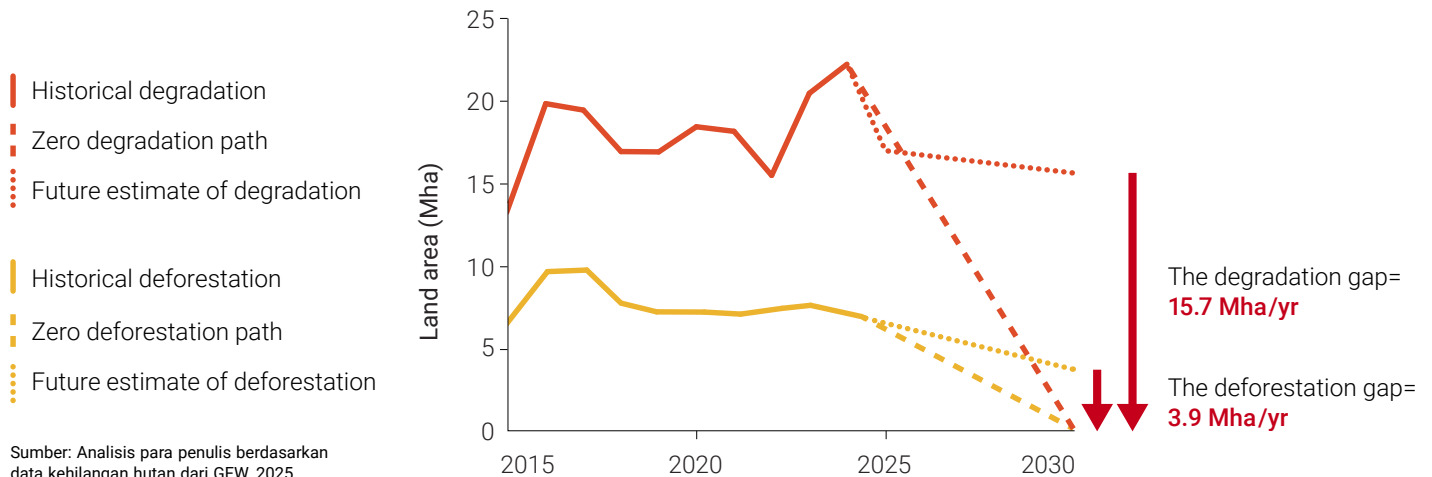
Selama 15 tahun terakhir, banyak negara dan inisiatif yang ada menjanjikan untuk melindungi hutan dan lahan, namun komitmen dan target tersebut seringkali tidak diimplementasikan atau tercapai. Setelah janji awal untuk rantai pasok “bebas deforestasi” pada tahun 2020, hampir 40 pemerintah dan lebih dari 55 perusahaan terbesar di dunia menandatangani Deklarasi New York tentang Hutan pada tahun 2014, berkomitmen untuk menghilangkan deforestasi dari produksi komoditas pertanian, serta mengurangi laju deforestasi sebesar 50% pada tahun 2020, dan menghentikan kehilangan hutan alam secara global pada tahun 2030. Deklarasi Hutan diluncurkan kembali pada tahun 2021 menjelang COP26 di Glasgow, dimana 145 negara menegaskan kembali tujuan untuk mengakhiri kehilangan dan degradasi hutan alam pada tahun 2030. Pada tahun 2023, hasil keputusan Global Stocktake di COP28 secara resmi memasukkan janji Deklarasi Hutan - untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan pada tahun 2030 - sebagai bagian dari naskah UNFCCC itu sendiri, memperluas komitmen untuk menghentikan kehilangan hutan pada tahun 2030 ke semua pihak yang menyetujui Perjanjian Paris. Negara-negara memperkuat tujuan ini pada tahun 2025 dalam keputusan yang diambil di Forum PBB tentang Hutan.

### Kesenjangan Hutan

Kehilangan dan degradasi hutan terus berlanjut dengan cepat. Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan sejak janji pertama untuk menghentikan kehilangan hutan, laporan ini menunjukkan bahwa

### Kesenjangan hutan dalam janji iklim nasional

Pada tahun 2030, janji-janji iklim saat ini masih akan memungkinkan hilangnya atau degradasi hampir 20 juta hektar hutan setiap tahun—penurunan yang sedikit dibandingkan dengan 26 juta hektar yang hilang setiap tahun selama dekade terakhir.



Sumber: Analisis para penulis berdasarkan data kehilangan hutan dari GFW, 2025.

masih ada kesenjangan yang signifikan antara janji iklim saat ini dan upaya untuk menghentikan pembukaan lahan dan degradasi hutan alam pada tahun 2030. Meskipun komitmen kebijakan dari pedagang utama komoditas berisiko hutan dan wilayah asal telah memainkan peran penting dalam mengirimkan sinyal pasar yang mendorong reformasi di negara-negara produsen, dekade terakhir menunjukkan bahwa tindakan sukarela saja tidak cukup untuk mengubah perilaku dan memicu skala transformasi yang diperlukan hingga tahun 2030.

Laporan ini untuk pertama kalinya menilai skala "kesenjangan hutan" - perbedaan antara komitmen yang dibuat selama 15 tahun terakhir, yang mencapai puncaknya dalam hasil Penilaian Global Pertama untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi dan degradasi hutan hingga 2030, dan rencana aktual yang diajukan negara-negara dalam NDCs dan strategi jangka panjang mereka. Komitmen saat ini mengakibatkan 'kesenjangan hutan' dengan deforestasi sebesar hampir 4 juta hektar yang terus berlanjut hingga tahun 2030 - pengurangan kurang dari 50 persen dari tingkat saat ini; dan dengan degradasi hampir 16 juta hektar - penurunan kurang dari 10 persen dari tingkat saat ini. Bahkan dengan janji-janji COP30 saat ini, hal ini mengakibatkan 'kesenjangan hutan' yang tersisa adalah **sekitar 20 juta hektar** yang diperkirakan akan hilang atau terdegradasi setiap tahun hingga 2030, menyoroti ketidacukupan kebijakan dan target yang direncanakan. Tindakan yang lebih tegas sangat diperlukan, jika tidak maka 'kesenjangan hutan' yang terus berkembang di dunia akan mengancam stabilitas iklim dan ekosistem

## Reformasi tata kelola ekonomi global untuk melindungi hutan

Penjelasan konvensional mengenai kegagalan dalam menghentikan deforestasi dan degradasi hutan cenderung berfokus pada kelemahan berikut: kemauan politik, sumber daya keuangan, komitmen dari aktor sektor swasta, dan kapasitas negara untuk melaksanakan keputusan. Pemahaman ini membentuk intervensi kebijakan yang berfokus pada rantai pasok, tata kelola, dan keuangan di sektor lahan dan hutan selama puluhan tahun. Namun, kesenjangan dan kekurangan tersebut belum mampu memberikan penjelasan penuh. **Yang jarang dibahas adalah bagaimana struktur tata kelola ekonomi global saat ini—aturan main politik ekonomi—membatasi otonomi kebijakan dan fiskal suatu negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tujuan pengurangan deforestasi.** Aturan-aturan tersebut mendorong banyak negara, terutama di Global Selatan, untuk bergantung pada industri ekstraktif sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas keuangan. Namun, industri-industri ini, seperti pertambangan, kehutanan, bahan bakar fosil, dan pertanian industri, juga merupakan pendorong utama kerusakan ekologi. Struktur tata kelola ekonomi global berkontribusi untuk membentuk kondisi untuk kesenjangan lahan dan kesenjangan hutan yang terungkap dalam laporan ini: negara-negara menghadapi kendala struktural yang berkelanjutan yang membatasi kemampuan mereka untuk beralih dari bahan bakar fosil dan industri ekstraktif, mengakibatkan ketergantungan pada pengurangan berbasis lahan

untuk memenuhi target iklim (kesenjangan lahan). Sementara itu, tekanan politik dan ekonomi yang sama membatasi kemampuan negara-negara hutan tropis untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan dan degradasi hutan, sementara negara-negara di Global Utara memanfaatkan aturan akuntansi yang tidak adil untuk menyembunyikan emisi mereka sendiri ('kesenjangan hutan').

Transformasi sistem-sistem ini sangat penting untuk mencapai tujuan global dalam hal perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Hal ini memerlukan reformasi struktural dalam kebijakan utang, fiskal, dan perpajakan, perdagangan, aliran modal, serta praktik penilaian kredit. Pembuatan kebijakan hutan harus melampaui instrumen berbasis pasar dan sukarela, dan sebaliknya menghadapi hambatan ekonomi struktural yang memperkuat pertumbuhan ekstraktif, serta mendorong perekonomian global yang reparatif dan berbasis hak yang melayani banyak orang bukan hanya segelintir orang.

## Kesimpulan

Meskipun skala tantangan ini tetap sangat besar, peluang baru untuk mengatasi sistem yang sudah mapan ini mulai muncul. Negara-negara berkembang, khususnya, mulai lebih tegas dalam menuntut reformasi sistem keuangan global untuk mewujudkan transformasi yang diperlukan dalam menangani krisis iklim dan keanekaragaman hayati, sekaligus membangun ekonomi yang tahan terhadap perubahan iklim yang memenuhi kebutuhan penduduknya.

Laporan ini menunjukkan bahwa sejumlah negara dengan emisi tinggi terus bergantung pada tingkat pengurangan karbon berbasis lahan yang tidak realistis, yang tidak dapat dicapai tanpa dampak signifikan terhadap mata pencaharian, hak atas lahan, produksi pangan, dan ekosistem. Selain itu, semua negara gagal menyikapi target global dengan serius untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan dan degradasi hutan hingga tahun 2030. Sebagian besar janji iklim baru juga mengabaikan kewajiban terkait hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas lahan, wilayah, dan sumber daya, yang mewakili kesempatan yang terlewatkan untuk memperkuat reformasi hak milik. Sebaliknya, negara-negara harus mengurangi ketergantungan mereka pada pengurangan karbon berbasis lahan dengan mempercepat pengurangan emisi di semua sektor dan memprioritaskan restorasi ekosistem daripada perkebunan atau perluasan hutan.

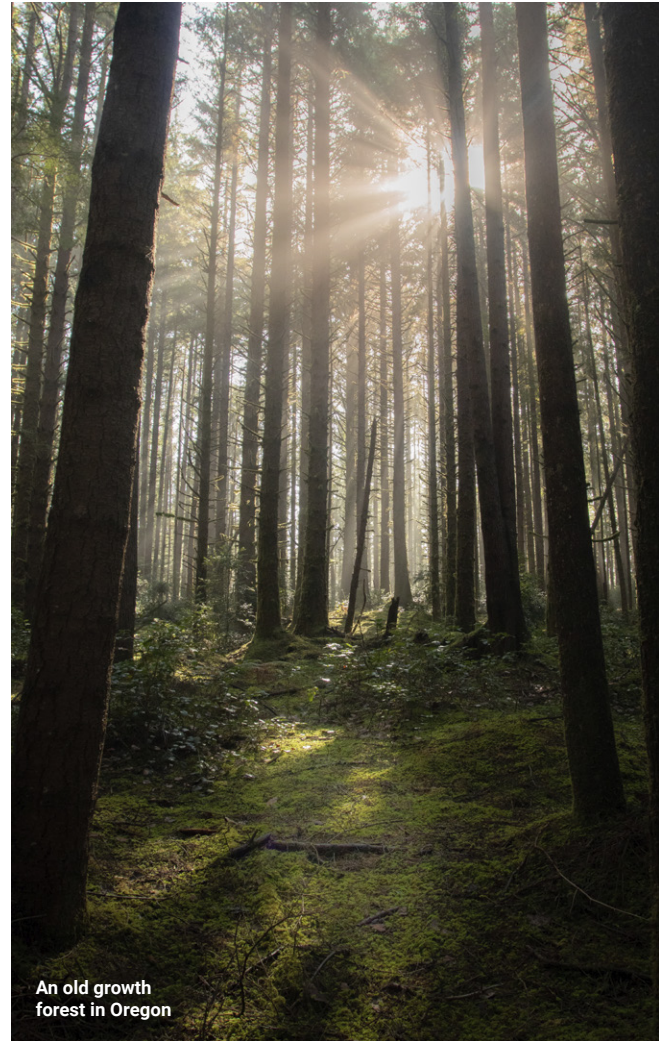
Untuk mewujudkan ambisi ini, diperlukan kesadaran akan pentingnya alam dalam menjaga stabilitas iklim. Hal ini memerlukan pergeseran fokus pada cara alam, lahan, dan hutan diperlakukan dalam tata kelola ekonomi global kita. Dengan kata lain, tanpa transformasi yang berarti pada sistem ekonomi global ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pencapaian semua tujuan Konvensi Rio akan tetap sulit tercapai. Perubahan transformatif yang mengarah pada model ekonomi yang restoratif dan berbasis hak adalah sesuatu yang diperlukan dan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Aturan ekonomi kita bukanlah hukum alam: mereka dibuat oleh manusia, dan manusia dapat mengubahnya. Bersama-sama, kita dapat merancang model ekonomi baru yang melindungi lingkungan, memperkuat komunitas, dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.

# Rekomendasi

Model ekonomi saat ini, aturan, dan aliran keuangan yang membentuk masyarakat kita, menjebak banyak negara, terutama di Global Selatan, dalam ketergantungan pada industri ekstraktif untuk mendorong perkembangan mereka. Namun, hal ini tidak harus terus berlanjut. Aturan ekonomi kita bukanlah hukum alam: mereka dibuat oleh manusia, dan manusia dapat mengubahnya. Kita harus memfasilitasi transformasi di sektor hutan dan lahan menjauh dari sistem ekstraksi, dengan mengidentifikasi dan mengganggu mekanisme struktural dan kebijakan yang saling terkait yang mempertahankan sistem ekstraksi. Kebijakan iklim dan keanekaragaman hayati harus mempertimbangkan dan berperan aktif dalam membentuk reformasi arsitektur keuangan global untuk memfasilitasi pergeseran transformatif dalam tata kelola hutan menuju pemulihan keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim.

Platform Antarpemerintah Ilmu Pengetahuan dan Kebijakan tentang Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem (IPBES) merekomendasikan perlunya perubahan transformatif untuk mengatasi kehilangan keanekaragaman hayati dengan menangani penyebab sistemiknya, bukan hanya penyebab langsungnya (O'Brien dkk., 2025). Hal ini memerlukan perpindahan dari reformasi bertahap menuju perubahan fundamental dalam institusi, ekonomi, tata kelola, dan nilai-nilai masyarakat. Penilaian ini menyerukan transformasi sektor-sektor yang mendorong kehilangan dan degradasi hutan - seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan energi - serta mengarahkan ulang sistem ekonomi dan keuangan untuk memprioritaskan alam, keadilan, dan kesejahteraan kolektif daripada keuntungan pribadi jangka pendek. Intisari dari transformasi ini adalah menjaga hak dan keadilan, termasuk kepemilikan lahan yang aman, tata kelola yang inklusif gender, dan pendekatan yang dipimpin oleh masyarakat adat, yang terbukti memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan alam.

Negara-negara harus mampu menciptakan bentuk-bentuk baru kedaulatan ekonomi, sehingga mereka memiliki ruang fiskal dan moneter yang cukup untuk mendorong rencana dan kebijakan transformasi yang bermakna yang memprioritaskan kesehatan ekologi dan mengakhiri ekstraksi yang merusak. Negara-negara harus menyelaraskan insentif dan aliran keuangan dengan tujuan iklim dan membangun visi baru tentang pembangunan transformatif yang berakar pada hak-hak komunitas dan stabilitas ekologi. Hal ini memerlukan institusi demokratis yang lebih baik yang menghargai dan mengakui suara serta peran aktif negara-negara Global Selatan. Narasi yang mendominasi pembentukan kebijakan harus berubah untuk mengakui kegagalan saat ini, sambil juga membangun narasi baru tentang kemungkinan dalam transformasi.



An old growth forest in Oregon

## Kesenjangan lahan

- **Membatasi ketergantungan berlebihan pada pengurangan karbon berbasis lahan dengan memprioritaskan penghentian bertahap emisi dari bahan bakar fosil dan merusak ekosistem.** Pemerintah harus memprioritaskan pengurangan segera emisi gas rumah kaca daripada pengurangan karbon berbasis lahan jangka panjang. Strategi berbasis lahan harus melengkapi, bukan menggantikan, pengurangan karbon jangka pendek.
- **Memastikan kebijakan penggunaan lahan yang adil dan berkelanjutan.** Kebijakan pengurangan karbon berbasis lahan harus melindungi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Kerangka kerja tata kelola yang bertanggung jawab mengintegrasikan tujuan sosial, keanekaragaman hayati, dan mitigasi iklim ke dalam perencanaan, termasuk tata kelola partisipatif dan pengelolaan ruang untuk mencegah dampak sosial atau ekologi yang merugikan.
- **Meningkatkan transparansi dan kejelasan dalam janji iklim.** Janji iklim nasional harus memberikan laporan yang rinci dan konsisten mengenai jenis, skala, waktu, dan lokasi aktivitas pengurangan karbon berbasis lahan. Memisahkan aforestasi, reforestasi, restorasi, dan penggunaan lahan lainnya akan memudahkan penilaian yang kuat mengenai kelayakan, pertukaran, dan permintaan lahan kumulatif.
- **Mengintegrasikan perencanaan penggunaan lahan dengan tujuan iklim dan keanekaragaman hayati.** Kembangkan kerangka kerja yang menyelaraskan tujuan pengurangan karbon, pemulihan ekosistem, dan konservasi. Insentif dan pemantauan harus memprioritaskan pemulihan ekosistem yang terdegradasi dan pemeliharaan layanan ekosistem, menghindari konversi skala besar lahan produktif atau alami yang sudah ada.

## Kesenjangan hutan

- **Membangun kerangka kerja akuntabilitas hutan global.** Mengembangkan standar pemantauan dan pelaporan yang dapat dibandingkan di seluruh Konvensi Rio untuk memastikan perlindungan hutan yang adil dan transparan, dengan mempertimbangkan konteks nasional dan ekologi yang berbeda. Menggunakan *Sistem Akuntansi Lingkungan-Ekonomi PBB—Akuntansi Ekosistem* untuk kerangka kerja, definisi, klasifikasi, indikator, dan pembangunan kapasitas yang konsisten guna menghasilkan pelaporan hutan yang terstandarisasi untuk Penilaian Global dan inventarisasi gas rumah kaca nasional. Akuntansi ini harus mencakup perubahan luas hutan bruto yang terkait dengan jenis dan kondisi ekosistem; kerugian cadangan karbon akibat deforestasi dan degradasi; serta keuntungan dari restorasi.
- **Meningkatkan perhatian terhadap degradasi hutan dalam kebijakan dan pemantauan.** Mengakui bahwa degradasi juga terjadi di hutan-hutan beriklim sedang dan boreal di belahan utara dan harus dimasukkan dalam kebijakan hutan yang komprehensif, selain fokus saat ini pada deforestasi tropis. Degradasi kurang terlihat dibandingkan deforestasi dan harus secara sistematis dicatat dalam pemantauan dan pelaporan nasional, termasuk untuk Penilaian Sumber Daya Hutan FAO. Pemantauan harus mencakup karakteristik, faktor pendorong, dan dampak degradasi untuk penilaian komprehensif kondisi hutan.
- **Mengintegrasikan tindakan hutan ke dalam NDCs.** Soroti peluang untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan melalui penghentian deforestasi dan degradasi hutan serta perluasan restorasi. Semua negara harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan hutan domestik tercermin secara jelas dalam NDCs dan pelaporan relevan lainnya, termasuk dalam Kerangka Transparansi yang Ditingkatkan.
- **Memperluas transparansi dalam pembiayaan berbasis hasil melampaui hutan tropis.** Laporan dan pembiayaan saat ini sebagian besar berfokus pada hutan tropis, sehingga hutan boreal dan hutan beriklim sedang kurang terwakili. Insentif harus dikaitkan dengan hasil yang dapat diukur dalam hal keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim, dengan target yang didefinisikan dalam hal perubahan antropogenik bruto di area, kondisi ekosistem, dan cadangan karbon di semua hutan, didukung oleh pemantauan dan transparansi yang diperkuat yang mencakup degradasi hutan. Pembiayaan yang diperlukan adalah tambahan dari pembiayaan publik yang ada dan yang akan datang.

## Utang

- **Mengurangi atau menghapus persyaratan kebijakan *austerity* (penghematan anggaran).** Saat suatu negara mengupayakan keringanan utang dengan bantuan IMF, kebijakan *austerity* justru bersifat kontraproduktif dan kemungkinan besar menambah ketergantungan terhadap komoditas dan degradasi lingkungan. IMF harus mengurangi atau menghapus persyaratan ini, atau setidaknya menyertakan perlindungan terhadap masyarakat paling rentan dan ekosistem yang menopang mereka dengan menargetkan pengurangan deforestasi.
- **Keringanan utang yang adil.** Kerangka Kerja Bersama G20 untuk Pengelolaan Utang (*G20 Common Framework for Debt Treatments*) saat ini mengecualikan banyak negara berpenghasilan menengah, tidak mewajibkan semua kreditur untuk berpartisipasi, dan tidak memiliki mekanisme penegakan untuk menjaga akuntabilitas di antara pemegang obligasi, kreditur swasta, serta kreditur multilateral dan bilateral. Kerangka ini seharusnya diperluas untuk menciptakan mekanisme keringanan utang yang adil dan dapat diakses secara universal.
- **Memberikan insentif untuk partisipasi kreditur.** Saat ini, Kerangka Kerja Bersama tengah mengalami proses yang lambat dan tidak jelas, sehingga keringanan utang yang diberikan belum memadai. Oleh sebab itu, kerangka ini perlu merespons dengan memberlakukan proses yang lebih lengkap dan sederhana, sekaligus memberikan insentif agar kreditur berpartisipasi secara penuh.
- **Membatasi skema *debt-for-nature swap* (pengalihan utang untuk membiayai konservasi lingkungan).** Skema *debt-for-nature swap* mungkin berguna untuk mendanai rencana konservasi berbasis masyarakat yang sudah ada. Namun, skema ini seharusnya tidak dijadikan alat utama untuk melunasi utang saat krisis atau digunakan untuk mengembangkan rencana konservasi baru. Karena krisis utang memerlukan aliran dana yang besar dan cepat, sedangkan rencana konservasi berbasis masyarakat membutuhkan waktu lama dan hanya perlu dana yang relatif kecil.
- **Bentuk baru pembiayaan dan instrumen keuangan.** Negara dan krediturnya harus terus mencoba bentuk pembiayaan baru yang paling kecil menimbulkan krisis utang atau memperparah ketergantungan pada komoditas. Misalnya, obligasi yang bergantung pada harga komoditas (*commodity-linked bond*) dirancang agar meringankan pelunasan saat harga komoditas turun, sehingga tidak perlu meningkatkan produksi komoditas selama krisis. Begitu pula, obligasi bencana alam juga memungkinkan mobilisasi modal tanpa harus semakin bergantung pada komoditas selama krisis jangka pendek.

## Pajak

- **Mengembangkan perjanjian pajak global baru dengan itikad baik.** Negara-negara seharusnya bekerja sama dengan itikad baik dalam negosiasi Konvensi Pajak PBB tentang Kerjasama Pajak Internasional, untuk mewujudkan sistem kerjasama pajak internasional yang inklusif, demokratis, dan transparan demi pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan tujuan lingkungan dan hak asasi manusia, serta memperhitungkan kebutuhan khusus dan ketidakadilan historis yang dihadapi oleh negara-negara di Global Selatan.
- **Mengembangkan aturan yang komprehensif, adil, dan progresif.** Konvensi Pajak PBB harus mencakup komitmen yang kuat terhadap pertukaran informasi otomatis, transparansi kepemilikan sebenarnya, dan pelaporan negara per negara yang terbuka di tingkat nasional dan internasional, guna secara tegas mengatasi rahasia keuangan, aliran keuangan ilegal, dan penyalahgunaan pajak korporasi. Selain itu, Konvensi Pajak PBB harus memungkinkan redistribusi hak untuk mengenakan pajak pada perusahaan multinasional, berdasarkan kehadiran ekonomi dan aktivitas aktual perusahaan di negara tersebut. Sebuah 'pajak tambahan atas keuntungan yang merusak lingkungan' harus dikenakan pada perusahaan yang memperoleh keuntungan dari deforestasi untuk mengurangi insentif terhadap aktivitas bisnis yang merugikan dan mengarahkan perilaku bisnis menuju mata pencaharian berkelanjutan dan perlindungan hutan. Secara lebih luas, pajak lingkungan progresif harus dirancang dan diterapkan untuk sekaligus mencegah aktivitas yang merusak lingkungan dan memperbaiki ketidaksetaraan sosial-ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, kebijakan fiskal harus sepenuhnya selaras dengan tujuan lingkungan, termasuk Perjanjian Paris, dan kewajiban hak asasi manusia, untuk menjamin pembangunan yang adil dan sesuai dengan iklim.
- **Memberlakukan pajak kekayaan baru.** Pajak kekayaan yang tegas harus dirancang dan diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi - yang sendiri merupakan salah satu faktor utama krisis iklim - baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini akan memerlukan penerapan langkah-langkah transparansi keuangan dan perpajakan internasional yang efektif dan transformatif melalui proses Konvensi Pajak PBB.

## Perdagangan

- **Menyelaraskan kebijakan pangan dan kehutanan.** Untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik, para pemangku kepentingan perlu melihat secara lebih luas masalah yang ditimbulkan oleh pertanian dan kehutanan terkait penggunaan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan, serta membedakan antara sistem ketahanan pangan dan sistem ekspor komoditas, sambil memastikan kedaulatan pangan dalam proses nasional.
- **Visi perdagangan yang berakar pada hak atas pangan.** Visi perdagangan harus terintegrasi ke dalam visi yang lebih besar mengenai peran pertanian dalam memenuhi hak atas pangan masyarakat, yang terpisah dan berbeda dari potensi pendapatan devisa dari ekspor komoditas. Sangatlah penting untuk memisahkan pangan dari produksi komoditas pertanian guna membatasi potensi pemerintah atau industri menggunakan keamanan pangan sebagai alasan untuk menghalangi atau melemahkan perlindungan hutan. Komitmen terhadap kedaulatan pangan dan hak atas pangan merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi, begitu pula perlindungan ekosistem yang tangguh, termasuk hutan. Aturan perdagangan pertanian harus didasarkan pada, bukan bersaing dengan, tujuan-tujuan tersebut. Aturan perdagangan juga harus mengatasi praktik bisnis yang membatasi yang mendominasi pasar pertanian.
- **Memajukan kedaulatan pangan.** Pendekatan yang secara radikal berbeda terhadap keamanan pangan, yang didasarkan pada sistem pangan yang terdesentralisasi, beragam, dan dikendalikan secara lokal daripada mengandalkan impor biji-bijian dan di saat yang sama memperketat standar ekspor komoditas dan menyeimbangkan distribusi biaya dan manfaat dari perdagangan komoditas - yang juga akan membantu mereset politik iklim dan hutan. Pendekatan ini akan membedakan kedaulatan pangan dari aktivitas perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok komoditas global.
- **Mitos ketahanan pangan yang melemahkan ambisi.** Mitos ketahanan pangan yang memperkuat model pengembangan pertanian berbasis ekspor komoditas harus diperdebatkan di tingkat nasional dan internasional. Prioritaskan ketahanan pangan sebagai dukungan untuk perlindungan hutan, bukan produksi komoditas, untuk menawarkan jalur kebijakan praktis dalam memerangi faktor utama perusakan hutan. Di daerah hutan yang terdegradasi, praktik penggunaan campuran dan agroforestri memberikan lebih banyak manfaat bagi alam dan komunitas daripada perkebunan pohon.

## Subsidi

- **Menghapuskan subsidi dan insentif pajak yang merugikan lingkungan.** Pertanian industri dan praktik penebangan hutan menerima miliaran dolar dana publik untuk mensubsidi praktik-praktik merusak mereka. Misalnya, skema pendanaan di Eropa yang mempromosikan kehutanan intensif dan biomassa berdasarkan Direktif Energi Terbarukan, serta beberapa model kehutanan produktif atau intensif berdasarkan aturan CAPI dan Bantuan Negara, perlu direformasi untuk menghapus dukungan finansial bagi perkebunan monokultur, penebangan sisa kayu dengan pengangkatan kayu mati, dan ekstraksi biomassa yang tidak berkelanjutan.
- **Mengalihkan pendanaan dari sumber-sumber yang merusak lingkungan.** Mengarahkan kembali subsidi dengan tujuan mendukung kedaulatan pangan dan praktik pengelolaan hutan yang ramah biodiversitas dan tahan iklim melalui pengeluaran publik dan investasi di sektor pangan dan pertanian akan melengkapi upaya untuk membatasi kekuasaan korporasi, termasuk inisiatif untuk meningkatkan transparansi harga, menantang konsolidasi industri pertanian, memperkuat undang-undang ketenagakerjaan pertanian, dan memperketat syarat-syarat pembiayaan dan kredit bagi korporasi yang berfokus pada komoditas. Pergeseran dari pendanaan komoditas spesifik menuju dukungan investasi pada lanskap yang menyediakan keragaman layanan, pangan, dan manfaat lainnya akan mengurangi keuntungan produksi komoditas ekstraktif.
- **Meningkatkan dukungan bagi petani kecil dan komunitas tanpa mengabaikan tujuan keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim.** Menganggap petani kecil dan agroekologi sebagai strategi perlindungan hutan, penting untuk menyederhanakan akses ke subsidi hutan yang bermanfaat, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan keadilan dalam alokasi dana untuk kepentingan pemilik hutan swasta dan komunal serta pemangku kepentingan yang berkepentingan.

## Kontributor

---

